KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 72 TAHUN 2014

TENTANG
IZIN LINGKUNGAN
RENCANA PENGEMBANGAN RSUP DR. M. DJAMIL PADANG

WALIKOTA PADANG,

Menimbang:

a. bahwa kegiatan Rencana Pengembangan RSUP DR. M.
   Djamil Padang, merupakan kegiatan yang wajib memiliki
   Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);

b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib
   memiliki Amdal dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek
   lingkungan hidup, wajib diterbitkan izin lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
   pada huruf a dan b diatas serta berdasarkan Keputusan
   Walikota Padang Nomor 71 Tahun 2014 tentang Kelayakan
   Lingkungan Hidup Rencana Pengembangan RSUP DR. M.
   Djamil Padang, perlu menetapkan Keputusan Walikota
   tentang Izin Lingkungan Kegiatan Rencana Pengembangan
   RSUP DR. M. Djamil Padang.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
   Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
   Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
   Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
   diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
   Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
   104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
   Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);


8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilai dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;

9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 14);


11. Keputusan Walikota Padang Nomor ...7... Tahun 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pengembangan RSUP DR. M. Djamil Padang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Memberikan izin lingkungan kepada :

1. Nama Perusahaan : RSUP DR. M. Djamil
2. Jenis Usaha : Pengembangan Rumah Sakit
dan/atau Kegiatan
3. Penanggung Jawab : Direktur
4. Alamat Kantor : Jalan Perintis Kemerdekaan Padang Kelurahan Sawahan Timur Kecamatan Padang Timur Kota Padang
5. Lokasi Kegiatan : Jalan Perintis Kemerdekaan Padang Kelurahan Sawahan Timur Kecamatan Padang Timur Kota Padang

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini, meliputi :
   a. Tahap Pra Konstruksi, meliputi:
      1. perijinan
      2. sosialisasi
      3. koordinasi
   b. Tahap Konstruksi
      1. penerimaan tenaga kerja
      2. mobilisasi kendaraan pengangkut bahan dan peralatan
      3. relokasi sementara, pembongkaran bangunan, dan pembangunan fisik
      4. pemutuskan hubungan kerja
   c. Tahap Operasi
      1. penerimaan tenaga kerja
      2. kegiatan pelayanan
      3. sistem sirkulasi atau jalur mobilisasi
      4. operasional utilitas listrik

KETIGA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki :
   a. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari :
      1. Izin pengoperasian insinerator;
      2. Izin pembuangan limbah cair;
      3. Izin gudang penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
      4. Izin pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
   b. Izin usaha dan atau izin lain yang terkait dengan kegiatannya

KEEMPAT : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan usaha dan atau kegiatan berkewajiban :
   a. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL dan peraturan perundang-undangan;
   b. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Walikota ini ditetapkan kepada Walikota Padang up. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapenda) Kota Padang;
   c. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap deskripsi rencana usaha dan atau kegiatannya.
KELIMA : Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan atau kegiatan dimaksud.

KEENAM : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak penting yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam RKL-RPL Keputusan ini, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf b.

KETUJUH : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dapat dikenakan sanksi Administrasi apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KEDELAPAN : Apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat, maka Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Maret 2014

Pj. WALIKOTA PADANG

[Signature]

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sdr. Kepala Dinas/instansi terkait;
2. Yang bersangkutan;
3. Peringga.